

PEMBELAJARAN RESPONSIF GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Irham Abdul Haris¹

Email: Irham@an-nur.ac.id

Abstract

Patriarchal culture contains values that place men and women in different and unequal positions and roles. This situation causes women to not have access, opportunities and control over development and do not benefit from development that is fair and equal to men. Such inequality is often justified by interpretations of religious teachings, so to change it, it is very much needed a cultural and structural will in changing the paradigm of Islamic religious education towards gender equality. Gender responsive Islamic education seeks to encourage women to obtain non-natural equality. This gender study can be used as an alternative paradigm construction amidst the strengthening of conservative currents who are trying hard to restore the role of women to the domestic sector.

Keyword: *Islamic education, gender, patriarchy*

Pendahuluan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Bab III pasal 4 ayat 1).² Ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara adil, tidak ada diskriminasi, dan memerhatikan keberagaman. Keadilan harus menjadi acuan utama pembangunan dalam segala hal di Indonesia. Kenyataannya, hingga saat ini pembangunan belum dapat memenuhi

¹Dosen IAI An Nur Lampung.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

kebutuhan laki-laki dan perempuan secara tepat. Masih banyak pembangunan yang lebih memihak pada kepentingan laki-laki dan mengabaikan kepentingan perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan.³

Sebenarnya dalam bidang apapun termasuk pendidikan belum terwujudnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi salah satunya oleh budaya patriarkhi yang sudah menjejantah dalam pola pikir masyarakat. Nilai-nilai patriarki menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, sub-ordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan serta tidak memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Di samping itu, ketidaktepatan pemahaman ajaran agama seringkali menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.⁴

Masih dalam wacana di atas, oleh karena itu untuk membongkar realitas budaya yang mengakar tersebut diperlukan sarana yang efektif, yang dalam hal ini adalah melalui pendidikan. Asumsinya adalah, pendidikan merupakan kunci utama dalam rangka *transfer of knowledge*, *transfer of behaviour* bahkan *transfer of culture*, bagi peserta didik. Sehingga dalam konteks kajian ini ketika yang disampaikan kepada anak didik bias gender maka pola pikir yang terbentuk pada peserta didik juga akan bias gender, begitu pula sebaliknya.

Pendidikan responsif gender hendaknya dimulai dari rumah tangga. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam

³ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 65.

⁴ Nazaruddin, "Mewujudkan Sekolah/Madrasah Yang Responsif Gender" <http://nazaruddinspdigurusiana.id/article/mewujudkan-sekolah-madrasah-yang-responsif-gender-1714986>, diunduh pada 12 November 2019.

mendidik dan mengarahkan anak-anaknya, karena apabila dalam satu keluarga tersebut terjadi bias gender maka hal ini akan sangat berpengaruh pada pola pikir anak-anaknya dimasa yang akan datang. Dalam lingkungan keluarga hendaknya diberikan perlakuan secara profesional dan secara profesional antara anak laki-laki dan perempuan. Sekalipun antara anak laki-laki dan perempuan memang berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep gender secara umum?
2. Bagaimana keadilan gender dalam islam?
3. Bagaimana pendidikan islam yang responsive gender?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Menurut Kirk dan Miller, Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan pendekatan kepustakaan adalah kajian yang menggunakan analisis data berdasarkan bahan tertulis, bahan kepustakaan berupa catatan yang terpublikasikan, buku, majalah, surat kabar, naskah, jurnal ataupun artikel.⁵

PEMBAHASAN

Pengertian Gender

Dalam kamus Inggris-Indonesia, disebutkan bahwa kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti “jenis

⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 12.

kelamin”.⁶ Gender sendiri merupakan pelabelan atas laki-laki dan perempuan. Kontruksi ini tidak lagi membedakan laki-laki dan perempuan atas perbedaan seks yang dimiliki. Kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. “Gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah peminim atau maskulin”.

Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam *women studies ensiklopedia* dijelaskan. Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin).⁷

Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.⁸

Dalam konstruksi Barat, ada beberapa masalah yang terkait dengan gender, yaitu *gender differentiation*, *gender equality* dan *gender oppression*. Dalam pandangan mereka bahwa di dunia

⁶ John M. Echols, and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 204.

⁷ Mufidah Cholil, *Bingkai sosial gender: Islam, strukturasi, dan konstruksi sosial*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 5.

⁸ Juditha, Christiany. "Gender dan seksualitas dalam konstruksi media massa." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 1.1 (2015).

ini masih ada perbedaan, ketidaksamaan dan kekerasan gender.⁹

Dalam perspektif kajian pemikiran Islam isu gender kemudian menjadi kajian yang menarik, sebab selama ini diasumsikan bahwa dalam beberapa teks ayat al Qur'an maupun hadits dianggap terdapat perspektif yang keliru dalam menempatkan peranan perempuan yang cenderung dimarginalkan.¹⁰

Keadilan Gender dalam Islam

Pada tataran praktis, Islam telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Adakalanya sama dan adakalanya berbeda. Hanya saja ada perbedaan dan persamaan pada pembagian peran dan fungsi masing-masing ini tidak bisa di pandang sebagai adanya kesetaraan atau ketidak setaraan gender. Pembagian tersebut semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama pentingnya didalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat, yakni tercapainya kebahagiaan yang hakiki di bawah keridhaan Allah semata.¹¹

Kewajiban beribadah dalam Islam itu sama, laki-laki maupun perempuan. Kedua-duanya dibebani tugas –tugas ibadah dan hukumhukum agama tanpa ada perbedaan. Shalat, puasa, zakat dan haji, ketika mampu merupakan kewajiban agama baik bagi laki-laki maupun perempuan. Setelah itu, perempuan sebagaimana laki-laki dibebani kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan pengajaran akhlak. "Maka kadar yang ditentukan itu sama bagi seluruh individu baik laki-laki

⁹ Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 11.1 (2012): 102-118.

¹⁰ Rusli, Meiliarni. "Konsep Gender Dalam Islam." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 1.2 (2011): 151-158.

¹¹ Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), 65.

maupun perempuan. Sebab, diri manusia itu pada hakekatnya adalah satu.¹²

Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, al-Qur'an menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.¹³

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianannya (QS. al-Nahl : 97). Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (QS. al-Hujurât : 19). Kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki seperti suami lebih tinggi di atas isteri, laki-laki pelindung perempuan, laki-laki memperoleh warisan lebih banyak dan diperkenankannya laki-laki berpoligami, tidak serta merta menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial "lebih"³ ketika ayat-ayat al-Qur'an tersebut diturunkan.¹⁴

Demikian pula, dalam posisinya sebagai khalifah, al-Qur'an tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu.¹⁵ Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi

¹² Intan, Salmah. "Kedudukan Perempuan dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." JPP (Jurnal Politik Profetik) 2.1 (2014).

¹³ Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 373-394.

¹⁴ Jaqueline Aquino Siapno, *Gender, Islam, nationalism and the state in Aceh: The paradox of power, co-optation and resistance*. Routledge, (London: Routledge Courzen, 2013), 65.

¹⁵ Periksa QS. Al-Baqarah/2: 30, dan QS. Al-an'am/6: 165.

yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas kekhalifahannya di bumi sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Laki-laki dan perempuan pun sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan (QS. al-A'râf : 172). Dalam al-Qur'ân tidak ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal begitu kuat.

Kemudian, ditinjau dari perspektif sejarah, perilaku Muhammad saw. terhadap kesetaraan gender adalah pada realitasnya Nabi Muhammad mendemonstrasikan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas sosial, mulai dari kewirausahaan, politik sampai kepada peperangan.

Pendidikan Islam yang Responsif Gender

Dalam dunia pendidikan formal bias gender dapat dilihat pada perumusan kurikulum. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum berprespektif gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi. Realitas ini jelas akan menghantar pada gambaran sosok perempuan yang lemah secara fisik dan psikis dibandingkan laki-laki. Akhirnya, citra perempuan dengan berbagai aspek negatifnya, mendarah daging seiring sejalan dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Akibatnya dalam dunia pendidikan data menunjukkan adanya ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan bagi kaum

perempuan masih dibawa kaum laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil jumlah perempuan.¹⁶

Pendidikan responsif gender jangan diterjemahkan sebagai upaya perempuan melawan laki-laki. Bukan demikian. Namun, bagaimana perempuan dapat mendapatkan kesetaraan nonkodrati.¹⁷ Yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan perlindungan, pelayanan dan kesejahteraan kaum perempuan. Senada dengan agenda yang menjadi fokus pemerintah dalam mengupayakan persamaan gender. *Pertama*, perlindungan terhadap kaum perempuan dari kekerasan, kejahatan dan tindakan yang ekstrim. *Kedua*, peningkatan kualitas hidup perempuan sesuai dengan indeks pembangunan manusia. *Ketiga*, memajukan dan mengembangkan kaum perempuan disegala bidang baik politik, ekonomi maupun sosial. *Keempat* memastikan bahwa tatanan kehidupan UU dan peraturan lainnya harus adil, tidak bias gender, dan tidak diskriminatif. Jika perempuan dibatasi peluang untuk mengenyam pendidikan dan tidak diberikan kesempatan, berprestasi serta berkontribusi kepada bangsa dan negara, sebagaimana juga kaum lelaki, program pemerintah tersebut tidak akan mungkin tercapai.

Kurikulum merupakan unsur utama bagi terlaksananya pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Kurikulum pada dasarnya merupakan wadah atau sarana untuk memuat dan mengembangkan visi dan misi yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan supaya misi tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Kurikulum tersebut kemudian akan dijabarkan dalam bahan ajar dengan segala perangkatnya, sehingga lembaga pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan gender, dengan demikian akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai visi dan missinya yang kemudian akan terimplementasi melalui kurikulum beserta komponen dan pirantinya.

¹⁶ Amos Neolaka, *Isu-isu Kritis Pendidikan: Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 8.

¹⁷ *Ibid.*

Atas dasar itu, pengarusutamaan gender melalui bahan ajar ini sedemikian penting dilaksanakan didasari oleh beberapa pertimbangan, *pertama*, pengalaman pendidikan memberi pengaruh yang signifikan terhadap bentuk nilai-nilai dan pola pikir yang dikembangkan oleh para pendidik, dimana keseluruhan pengalaman tersebut berpengaruh terhadap mindset, pola sikap dan perilaku rasional antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, ketidakadilan gender telah menjadi realitas yang tidak terbantahkan hampir dalam setiap sektor kehidupan, buktinya stereotyping, subordinasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan terhadap kaum perempuan kerap kali terjadi dan karena itu, diperlukan usaha sistematis dalam mengentaskannya, yakni dengan menyadarkan kaum perempuan akan hak-hak dan kewajibannya secara proporsional, dan pada sisi lain memberikan informasi argumentatif kepada laki-laki bahwa sesungguhnya apa yang diterima selama ini merupakan hal yang gender biased. *Ketiga*, internalisasi nilai-nilai yang tidak bias gender tersebut akan semakin efektif jika bertitik tolak pada materi-materi keagamaan, sehingga dengan menunjukkan bahwa telah terjadi manipulasi teks-teks keagamaan yang bias gender dan telah terjadi misinterpretasi terhadap doktrin-doktrin keagamaan, maka emosi dan kesadaran keagamaan generasi muda akan bergelora, untuk kemudian mereka bersikap kritis terhadap interpretasi tersebut, sehingga akhirnya terjadi dinamika interpretasi yang mengantarkan pada terciptanya dinamika pemikiran keagamaan yang sangat mempengaruhi terhadap dinamika kehidupan sosial.

Kemudian, strategi untuk mengintegrasikan materi gender dalam suatu kurikulum, agar terimplementasi konkrit dalam bahan ajar, paling tidak, ada empat level integrasi yang perlu ditempuh. *Pertama*, *contributions approach*. Pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum yang ada. *Kedua*, *additive approach*. Dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa mengubah struktur

kurikulum. Pemikiran dan ide-ide baru tentang gender dapat dimasukkan dan dikorelasikan dengan kurikulum yang ada. Ketiga, *transformational approach*. Pada pendekatan ini, tujuan, struktur dan perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan dan perspektif yang sensitif gender. Keempat, *social action approach*. Pada pendekatan ini, siswa (mahasiswa) diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka, yang dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan mengenai konsep, peran dan relasi gender dalam masyarakat, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi itu, bagaimana keadaannya dalam kelas apa terjadi diskriminasi dan bagaimana diskriminasi tersebut mesti disikapi. Dengan pendekatan ini dimaksudkan agar siswa (mahasiswa) dapat melakukan kritik sosial bahkan dapat melakukan perubahan sosial.

Proses pendidikan merupakan proses pengembangan segenap potensi peserta didik tampak membedakan laki-laki atau perempuan. Agama (Islam) mempersamakan antar laki-laki dan perempuan dalam hak belajar. Masing-masing memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang mereka ingiinkan, berupa berbagai jenis pengetahuan, sastra, dan budaya. Rasulullah saw , bersabda, “ menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim “ (HR. Bukhari).¹⁸ Prinsip pengajaran perempuan telah diterapkan pada zaman Rasulullah saw dan dilanjutkan pada masa Khulalafaur Rasyidin. Maka Aisyah mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi perempuan yang paling berilmu pada masanya. Oleh karena itu, Urfan Bin Zabair berkata tentang Aisyah “Saya tidak menemukan orang yang sangat menguasai ilmu-ilmu faqhi, kedokteran, dan syair selain Aisyah “. Demikian pula Hafsa binti Umar bin Khattab selalu mendalami ilmu hingga setelah menikah dengan Rasulullah saw. Juga termasuk orang-orang yang mencintai ilmu adalah Fatimah Az- Zahra, Sakinah binti Imam al- Husain, Asma binti

¹⁸ Samsul Nizar. *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2013), 204.

Abu Bakar, dan perempuan lainnya yang meraih ilmu sama seperti laki-laki. Al Qur'an mendorong seluruh manusia untuk mencari ilmu tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak bekerja dalam Islam. Islam memperkenankan perempuan mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakan dan sesuai dengan kodratnya.¹⁹

Kesimpulan

Pendidikan responsif gender adalah perlakuan dalam member kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana halnya Islam menganggap bahwa kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, yaitu sebagai hamba Allah. Sebagai manifestasi hal tersebut dalam pembelajaran pendidikan islam, kurikulum pendidikan tidak lagi terdapat hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Sangat perlu adanya kemauan keras (komitmen politik) dari pemerintah—dan segala instansi terkait—untuk mewujudkan *gender mainstreaming*, sebab tanpa pra kondisi demikian, sulit menjaga kontinuitas hal tersebut, bahkan boleh jadi hanya sekedar mode saja, sehingga efektivitas yang diperoleh tidak sebanding dengan besarnya dana dan pengorbanan fisik serta energi intelektual yang dikerahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholil, Mufidah. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, Dan Konstruksi Sosial*. 2010. Malang: UIN-Maliki Press.
- Echols, John M., and Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. 2019. Jakarta: Gramedia, 2019.

¹⁹ Nasri Ulyan, *Akar Historis Pendidikan Perempuan Refleksi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 5.

- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 2019. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual*. 2014. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Nasri, Ulyan. *Akar Historis Pendidikan Perempuan Refleksi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid*. 2015. Yogyakarta: Deepublish.
- Neolaka, Amos. *Isu-isu Kritis Pendidikan: Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan*. 2019. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nizar, H. Samsul. *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. 2013. Jakarta: Kencana,
- Rahardjo, Mudjia. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. 2010. Malang: UIN Maliki Press.
- Siapno, Jaqueline Aquino, *Gender, Islam, nationalism and the state in Aceh: The paradox of power, co-optation and resistance*. 2013. London: Routledge Curzon.
- Intan, Salmah. "Kedudukan Perempuan dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." *JPP (Jurnal Politik Profetik)* 2.1 (2014).
- Juditha, Christiany. "Gender dan seksualitas dalam konstruksi media massa." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 1.1 (2015).
- Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 11.1 (2012): 102-118.
- Rusli, Meiliarni. "Konsep Gender Dalam Islam." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 1.2 (2011): 151-158.

Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 373-394.